

ISLAM KIRI:

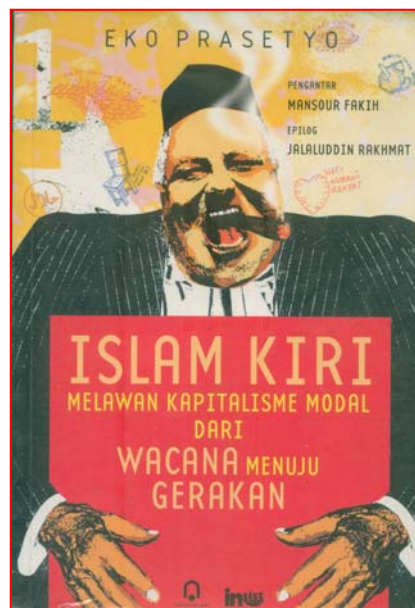
Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana menuju Gerakan

Pereview: Eko Supriyadi

LISENSI DOKUMEN

Copyright: Digital Journal Al-Manar. **Lisensi Publik.** Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan artikel ini bagi kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial, dengan tetap mencantumkan atribut penulis dan keterangan dokumen ini secara lengkap.

Penulis : Eko Prasetyo
Pengantar : Dr. Mansour Fakih
Tebal buku : 365 halaman
Penerbit : Insists Press & Pustaka Pelajar



Paradigma *transformatif*—selain tradisional, modernis dan revivalis—adalah pikiran alternatif yang meyakini bahwa kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi, politik dan budaya. Keadilan menjadi prinsip fundamental dari paradigma ini. Fokus kerjanya adalah selain mencari akar teologi, metodologi, dan aksi yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Pemihakan terhadap kaum miskin dan tertindas (*dhu'afa*) tidak hanya diilhami oleh Al-Qur'an, tetapi juga hasil analisis kritis terhadap struktur yang ada. Islam bagi kelompok ini dipahami sebagai agama pembebasan bagi yang tertindas, serta mentransformasikan sistem eksploitasi menjadi sistem yang adil. Inilah yang mendasari gerakan Islam Kiri untuk mengambil posisinya dalam menghadapi problem sosial yang dihadapi umat Islam saat ini.

Umat Islam, terutama kelompok miskin tertindas, di era globalisasi kapitalisme akan menghadapi gelombang kemiskinan struktural yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Golongan Muslim miskin membutuhkan teologi, paradigma dan analisis sosial yang memihak pada mereka—itulah teologi bagi kaum tertindas, teologi yang membebaskan mereka dari ketertindasan dan eksploitasi global. Bagi golongan miskin dan marjinal, kehadiran globalisasi lebih membawa ancaman ketimbang berkah.

Sebuah teologi yang memberi ruang bagi pembelaan kaum tertindas sangat diperlukan dengan membentuk gerakan sosial (*social movements*). Tantangan terbesar yang dihadapi adalah dukungan masa atas legitimasi teologis ini. Islam Kiri dalam kenyataannya tergolong kecil dari segi jumlah dan cenderung ada jarak dengan masyarakat. Tantangan lain adalah kuatnya paradigma dominan penganut globalisasi neoliberalisme yang telah berhasil menundukkan pemerintah dan negara, melalui infiltrasi gagasan pasar bebas atas setiap kebijakan negara.

Dalam sejarah keagamaan telah dibuktikan, bahwa sebuah agama bisa menyalakan revolusi dan meruntuhkan kekuasaan korup. Iman dalam konteks ini adalah proses internal kenyataan dan dorongan menuju perubahan dan bukan mencari penyesuaian atas realita yang ada. Jangan sampai agama justru dimanfaatkan untuk mempertahankan dan mendukung status quo. Sikap keagamaan yang berlabel 'kiri' ini mengandung makna bahwa Islam adalah agama yang meletakkan kaum yang terzalimi sebagai pihak pertama yang harus dibela, dilindungi dan diperjuangkan. Islam Kiri bukan ingin menegakkan kediktatoran atau perombakan terhadap doktrin keagamaan yang ada, melainkan menginterpretasi dari sudut pandang khusus—interpretasi yang sangat dibutuhkan

keberadaannya namun banyak dilupakan oleh sebagian besar umat Islam—yaitu untuk menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Dalam kenyataannya kesadaran teologis umat belum menyentuh berdampak secara langsung terhadap kaum lemah. Gagasan egaliterianisme ekonomi tidak masuk dalam khazanah teologi sebagian besar umat lantaran kekayaan sebagian orang Islam begitu besar; pada sisi lain ketimpangan itu menimpa sebagian besar umat Islam yang jatuh dalam penderitaan. Di sini agama telah kehilangan peran revolusionernya karena menjadi sekedar perkakas untuk sebuah pergelaran diskusi, paling yang berminat, akan menjadikan agama sebagai komoditas seni yang menghibur. Sementara itu tujuan akhir Islam, sebagaimana diungkapkan Sayyid Qutb, membangkitkan kemanusiaan manusia, membanggunya, menyegarkan, dan mengibarkan kejayaan dan membuatnya dominan dalam segala aspek kehidupan.

Untuk membangkitkan kesadaran kritis, umat perlu menoleh sejarah nabi, di mana mereka diutus untuk melawan segala bentuk penindasan dan kesewenangan penguasa. Mereka muncul untuk mengenalkan pada masyarakat tentang nilai-nilai keadilan yang terus ditelikung oleh kepentingan penguasa. Bahkan penolakan para pembesar Quraisy terhadap ajaran Muhammad, salah satu motifnya karena agama ini diikuti oleh orang miskin yang derajatnya disejajarkan dengan golongan lain. Jika Muhammad hanya mengajarkan keesaan Tuhan tanpa menyerang tatanan ekonomi dan sosial yang pincang serta tidak melarang riba secara keras, mudah saja suku Quraisy menerima Islam. Perlawanan keras yang dilancarkan kaum Mekah bukan karena sikap keras Quraisy terhadap ajaran Nabi, melainkan karena faktor ekonomi dan politik, di mana mereka khawatir ajaran Muhammad akan mengancam asset ekonomi yang mereka kuasai. Muhammad ditakutkan akan membangun bentuk kekuasaan politik yang baru dalam masyarakat oligarki yang telah ada. Sementara itu Islam di tangan Muhammad menjadi kekuatan yang memberantas segala kesewenangan sehingga melaluinya sejarah tentang harta mulai dirombak. Hal ini didasarkan karena harta dalam Islam juga dapat melalaikan manusia dari ajaran Allah (Q.S., 63: 9), memandang bahwa Islam harta harus memiliki fungsi sosial.

Nabi sadar bahwa bahasa bisnis dan ekonomi lebih mudah dipahami oleh manusia di mana pun, karena manusia memiliki dorongan untuk mencari keuntungan. Bahasa tersebut dipakai untuk media menyampaikan pesan, ayat-ayat Al-Qur'an pun juga menyebut banyak kosa kata bernuansa ekonomi, seperti perdagangan, bangkrut, untung,

rugi, kekayaan, kemiskinan dsb. Demi membela kaumnya, Muhammad lebih memilih memimpin kaum tertindas dan mengambil gaya hidup seperti mereka. Daya tarik Islam bukan hanya pada isi wahyunya, tetapi juga didukung oleh semangat hidup dari pemimpinnya.

Dalam posisi seperti itulah dimensi-dimensi revolusioner Islam untuk pembebasan secara sistematis telah dituangkan. Di sini Islam memiliki tiga prinsip penting kekuatan sosial, yaitu: *Pertama*, Islam mendasarkan dakwahnya untuk aksi menuju perubahan positif. Belenggu struktur menjadi perhatian utama dengan mengandalkan salah satunya pada keimanan subyektif dalam diri setiap pribadi. *Kedua*, keyakinan akan keunggulan dan kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama, dengan ini segala pemecahan atas segala permasalahan dapat dicari alternatifnya. *Ketiga*, Islam adalah *rahmatan lil alamin*, bersikap terbuka dan memberikan pencerahan kehidupan manusia. Pemihakan diberikan kepada kebenaran, bukan pada pemegang aset ekonomi, penyandang kekuasaan, dan petinggi masyarakat, melainkan seluruh lapisan umat, utamanya mereka yang hak-haknya terampas. *Keempat*, Islam memiliki hubungan yang erat dengan umat secara langsung, diharapkan mampu mewujudkan sebuah metodologi bagi perubahan sejarah.

* * * *

Jatuhnya kekuasaan politik Islam ditandai dengan ambruknya tiga kerajaan Islam baru pada abad ke-16, yaitu Utsmaniyyah (di Asia kecil, Anatolia, Irak, Suriah, dan Afrika Utara), Safawwiyah (di Iran), dan Mongol (di India). Sejak kemundurannya, secara berangsur negeri-negeri tersebut dibanjiri penetrasi modal dari kaum kolonialis. Penetrasi modal pertama kali adalah pembuatan terusan Suez yang membawa bencana bagi kehidupan ekonomi dan sosial Mesir. Setelah itu berangsur pula penetrasi pada negara Iran, Aljazair, Tunisia dan negeri Muslim lainnya. Kepemimpinan Islam tampak sebagai kumpulan aristokrat yang sukses menjadi elit tetapi pandangan politiknya konservatif. Potensi revolusioner telah lumpuh oleh pembangunan yang bernuansa kapitalistik di negeri mereka.

Dari kekalahan negeri-negeri Islam tersebut akhirnya merubah hubungan ekonomi politik antara negara Muslim dan bukan Muslim. Nyatalah bahwa sistem ekonomi dunia yang hidup saat ini bercorak eksploitatif. Setidaknya terdapat beberapa karakteristik yang membuktikan hal ini, yaitu: *Pertama*, *promethean*, yaitu menuju suatu penguasaan tanpa batas atas kekuatan materi untuk kepentingan manusia. Sejak revolusi industri, kapitalisme telah

menancapkan kakinya untuk mengubah dunia menjadi alat pemenuhan hasrat dan ambisi. *Kedua, productiviste*, yaitu memproduksi barang dan jasa sekaligus melipatgandakannya tanpa batas rasional kebutuhan manusia. Tuntutan untuk mengkonsumsi terus menerus suatu produk selalu dipropagandakan demi keuntungan kapitalisme. *Ketiga, expansionisme*, yaitu perluasan akses terhadap keberlangsungan hidup kapitalisme. Di sini *resources* merupakan sasaran yang selalu diburu meskipun dengan cara-cara kotor, seperti pembantaian suatu etnis dan penjajahan dan bentuk nekolim (neokolonialisme dan neoimperialisme) lainnya, termasuk di dalamnya adalah penaklukan budaya masyarakat agar tunduk sebagai konsumen setia produk-produk kapitalisme. *Keempat, marchand*, yaitu sistem ekonomi dunia yang berjalan melalui perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Keempat ciri ini bersinergi untuk menciptakan proses akumulasi kapital dalam skala besar. Proses akumulasi modal oleh Kapitalisme global kemudian menempuh langkah-langkah strategis yang sangat merugikan negeri-negeri Muslim. Mereka mempergunakan serangkaian isu yang pada dasarnya bertujuan membuka akses kapitalisme yang lebih luas tanpa hambatan.

Tabel I. Senjata-senjata penghancur negeri Muslim yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya antara lain adalah:

1. Isu terorisme sebagai jagal terhadap setiap negara yang tidak mematuhi kebijakan AS. Dalam hal ini Osama bin Laden (dan Al-Qaeda-nya) direkayasa sebagai simbol institusi teroris. Momok terorisme kemudian disusupkan ke dalam konstruk berpikir masyarakat dunia, bahkan beroperasi melalui jaringan pemerintahan dan secara tidak langsung pada umat Islam sendiri. Penerapan ISA Malaysia, dan UU antiterorisme digalakkan di negeri-negeri Muslim merupakan bukti bahwa negeri Muslim sendiri ketakutan dengan ancaman hantu terorisme sehingga ikut melegitimasi proyek pembantaian massal AS. Dengan isu terorisme, gerakan Islam yang semula menjadi lapisan oposisi yang disegani mulai diringkus dan dilabeli sebagai kelompok garis keras. Dengan demikian gerakan antiterorisme bukan lagi murni kemanusiaan melainkan tak lebih dari manuver politik yang hendak memfungsikannya sebagai pengawas dan mendisiplinkan tatanan sesuai keinginan negara Barat. Artinya, terorisme membuat sistem kekuasaan internasional dapat berjalan secara optimal dan politik pasar akan menuai sukses.
2. Isu HAM. Dengan dalih penegakan HAM maka banyak negeri Muslim dihajar embargo ekonomi dan politik. Akibatnya rakyat negeri-negeri tersebut menderita. Sejarah paling tragis pelanggaran hak asasi atas kemerdekaan berdaulat sekaligus kekalahan umat Islam dunia adalah pendirian negara zionis Israel yang dilegitimasi oleh AS dan sekutu Baratnya.
3. Isu demokrasi yang (sesungguhnya) ambivalen. Dengan beralih demokrasi maka AS gemar melakukan justifikasi dan vonis atas berbagai kasus

internasional. Standar ganda dan diskriminasi adalah ciri khas gaya AS. AS menganggap dirinya sebagai negara yang adil dan konsisten dalam menegakkan hukum internasional. AS sudah terlalu kasar untuk bersembunyi dari kedok-kedok ini. Banyak kasus pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan zionisme Israel dan sekutu AS malah dilegitimasi; sebaliknya terhadap negeri-negeri Muslim AS tampil sebagai polisi dunia yang bertindak 'bijak' menegakkan hukum internasional. Dalam konteks ini AS kerap memanfaatkan hak vetonya untuk memutuskan setiap kebijakan internasional yang berlawanan dengan misi AS.

4. Homogenisasi kebudayaan. AS telah berhasil mendominasi berbagai institusi kebudayaan yang selalu mempropagandakan peradaban universal, padahal jika ditilik hal itu hanyalah proyek homogenisasi kebudayaan ke seluruh dunia, yang dengan itu proyek kapitalisme menuai kemenangannya.
5. Memanfaatkan badan ekonomi dunia. AS bersama pemerintah negara Barat memainkan peran penting dalam jaringan institusi birokrasi dan kekuatan multilateral lain yang mewujud ke dalam badan-badan ekonomi dan perdagangan dunia (IMF, IGGI, CGI, WORLD BANK, WTO). Melalui bantuan dalam bentuk utang, Barat berusaha mendikte negeri-negeri Muslim untuk mematuhi tuntutan mereka.

Mesin birokrasi diciptakan sesungguhnya juga merupakan cara kapitalis untuk menjaga berlangsungnya akumulasi modal secara terus-menerus dan mempertahankannya dari berbagai hambatan teknis dan administratif dengan cara menetapkan aturan-aturan yang harus ditaati bagi seluruh komponen proyek kapitalisme. Dengan modal tersebut maka kekuasaan dapat dikendalikan. Dengan modal pula hukum dapat direayasa sesuai kepentingan pemilik modal. Mereka melakukan kontrol efektif agar kepentingan ekonomi tetap menguntungkan kelas berkuasa. Mereka mempertahankan harmonisasi antar kelas-kelas dalam masyarakat dengan ikut menengahi konflik-konflik kelas yang acapkali muncul. Akibatnya, keberadaan tatanan yang mereproduksi dan melestarikan ekonomi borjuis selalu terjaga. Bukti nyata pengalaman kebijakan pemerintah Indonesia yang terbukti berwatak neoliberal, dapat dilihat pada **Tabel II** berikut ini:

KEBIJAKAN	TUJUAN	IMPLIKASI NYATA
Pemotongan subsidi dan belanja pemerintah	Mengurangi permintaan yang berlebihan dan mengurangi anggaran belanja negara.	Terjadi pemotongan anggaran belanja dan subsidi untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, sanitasi, penyediaan air bersih, pengairan, tenaga listrik, pembangunan sarana jalan dan transportasi. Hasilnya angka kematian bayi dan ibu sangat tinggi karena pelayanan kesehatan mahal. Jumlah mereka yang putus sekolah besar akibat

<p>Kenaikan angka suku bunga</p>	<p>Alokasi sumber daya modal hanya kepada para penanam modal yang sangat efisien.</p>	<p>mahalnya ongkos pendidikan. Tingginya angka kecelakaan karena minimnya dana perawatan angkutan bagi kendaraan untuk mereka yang miskin; kecelakaan kereta ekonomi paling tinggi angkanya.</p> <p>Kredit pada kenyataannya digunakan oleh pemilik bank dan dimanfaatkan untuk penggunaan yang konsumtif dan berakhir dengan kemacetan yang ujung-ujungnya adalah menumpuknya utang sektor swasta. Efek lain ketentuan ini adalah berkurangnya akses bagi pengusaha kecil dan petani-nelayan terhadap kredit dan memicu inflasi sekaligus mendorong munculnya spekulasi.</p>
<p>Penurunan tarif dan kuota impor</p>	<p>Peningkatan daya saing di pasar internasional dan meningkatkan efisiensi.</p>	<p>Diabaikannya industri-industri lokal, mengurangi kemampuan swasembada pangan; meningkatkan impor barang mewah, sementara rakyat miskin tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar mereka.</p>
<p>Swastanisasi perusahaan-perusahaan negara</p>	<p>Menjadikan perusahaan lebih efisien dan dapat berkompetisi dalam masyarakat internasional.</p>	<p>Prasarana dan sarana publik beralih tangan ke sektor-sektor swasta yang hanya mementingkan perolehan laba ketimbang kesejahteraan sosial masyarakat; ongkos pelayanan publik menjadi mahal sehingga tak terjangkau rakyat miskin.</p>
<p>Revolusi hijau sektor pertanian</p>	<p>Peningkatan produksi pangan, khususnya padi, melalui teknik asupan, yang berupa bibit unggul, aplikasi pupuk buatan, pestisida, dll.</p>	<p>Asupan kimia yang tidak terkontrol telah menyebabkan serangan hama pada tanaman pangan—bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah; penggunaan teknologi membuat banyak tenaga kerja tersingkir dan harga pangan rendah karena produksi berlimpah yang berujung pada kemiskinan kaum tani.</p>
<p>Penghapusan hambatan terhadap perusahaan asing (investor) yang masuk</p>	<p>Dapat membawa masuk modal produktif, membuka lebar peluang kerja, membantu industrialisasi dan membentuk</p>	<p>Terjadi denasionalisasi di mana kepemilikan asing terhadap kekayaan negara meningkat pesat; tingginya impor barang setengah jadi dan barang modal; besarnya aliran keuntungan dan pendapatan investasi yang keluar di mana mengarah pada proses de-kapitalisasi (<i>capital flight</i>); menciptakan</p>

Penerapan sistem hukum paten	jaringan pasar. Sistem hukum yang memberikan perlindungan dan jaminan atas hak milik atas tanah, kapital, bangunan, temuan-temuan bahkan budidaya tanaman.	instabilitas moneter. Monopoli pada penguasaan aset-aset kekayaan publik, bahkan paten pada tanaman telah berdampak langsung pada monopoli hasil-hasil pertanian oleh perusahaan-perusahaan transnasional; negara harus membayar jika harus menggunakan kekayaannya sendiri yang sudah dipatenkan orang asing.
-------------------------------------	---	---

Kenyataan ini berakibat Negara—sebagaimana ungkapan Nicos Poulantzas—mengambil fungsi sebagai penjaga stabilitas politik; pada masyarakat kapitalis keadaan ini menjadi kunci bagi terjaminnya akumulasi modal. Sebab bangunan Kapitalisme hanya berjalan menurut *fred block*; adanya dua kondisi penting, yaitu pengembangan modal (*capital accumulation*), dan kapitalisme yang mampu memproduksi dirinya. Karenanya eksistensi negara kapitalis bergantung pada apakah sistem tersebut bisa memberi peluang pengembangan modal.

Posisi borjuasi lokal dalam hal ini adalah mereka yang memiliki kedekatan hubungan dengan penguasa; ia mendapat hak-hak istimewa khususnya dalam pengenaan tariff, tingginya subsidi pemerintah, dan pemberian konsensi yang sangat besar. Ia kemudian mempengaruhi berbagai bentuk peraturan khususnya dalam kaitan dengan pembatasan investasi asing.

Nasionalisme juga merupakan ideologi yang dijadikan selubung bagi kepentingan borjuasi lokal untuk menumpuk keuntungan. Dalam konteks ini maka pemodal memiliki kekuasaan veto atas negara. Beberapa program yang mengatasnamakan kepentingan umum sesungguhnya merupakan kegiatan yang berorientasi penumpukan modal. Sehingga mereka menjalankan program pembangunan seraya menelantarkan kehidupan rakyat.

Kasus korupsi di Indonesia sesungguhnya adalah biang kebobrokan dan kebangkrutan bangsa ini. Dalam hitungan riil, jika utang Indonesia harus ditanggung oleh seluruh penduduknya dari bayi hingga lanjut usia, maka tiap-tiap kepala harus menanggung utang sebesar tujuh juta rupiah. Lemahnya sistem hukum dan rendahnya moral penyelenggara pemerintahan dan hukum membuat korupsi semakin gemuk dan

sulit diberantas. Padahal dampak kebobrokan tindakan ini harus ditanggung seluruh rakyat yang mayoritas masih miskin.

Sisi yang kini juga telah mengalami penetrasi kapitalisme adalah pendidikan. Pendidikan diorientasikan bagaimana agar peserta didik mampu menghadapi tantangan kerja. Usaha paling utama untuk memenuhi kebutuhan ini adalah memformat kurikulum agar cocok dengan kebutuhan ekonomi kapitalis. Pembangunan yang kapitalistis mengantarkan lembaga pendidikan sebagai institusi yang berorientasi ganda, yaitu pengabdian sekaligus keuntungan. Pendidikan biaya tinggi adalah salah satu dampak dari kapitalisasi pendidikan ini, selain rendahnya alokasi anggaran pengeluaran untuk sektor pendidikan oleh pemerintah.

Terhadap penetrasi kekuatan modal tersebut, gerakan Islam mengalami kelumpuhan. Umat Islam telah kehilangan kesadaran bahwa kalimat keadilan dan pemerataan menjadi wahyu yang harus diturunkan menjadi bahasa aksi. Gerakan Islam kurang mampu memotivasi pengikutnya untuk keluar dari krisis identitas sebagai bangsa yang merdeka. Akibat dari ketidakmampuan menyusun bahasa aksi dan selalu menggunakan pendekatan normatif ketika menghadapi tantangan mudah sekali terjatuh pada sikap pragmatis. Pragmatisme ini pula yang menyebabkan gerakan Islam tidur pulas dalam ketidaksadaran ketika kekejaman gerak modal menimpa umat.

Usaha-usaha pengembangan kesadaran kritis terhadap posisi negara banyak diabaikan oleh gerakan Islam. Evolusi kaum terdidik Muslim sehingga menempati posisi sebagai bagian dari kelas menengah ternyata hanya mengukuhkan hasrat yang tempramen gerakan pembaruan pada bidang-bidang yang sangat sektoral. Gerakan Islam miskin akan kecakapan dalam melakukan reorganisasi kekuatan demi membela umat yang tertindas. Secara paradoks sejarah menunjukkan bagaimana korban Tanjung Priok, Lampung, Aceh, surut dari perhatian kaum pembaru dan ormas Islam yang besar, seperti NU dan Muhammadiyah.

Struktur sosial di mana modal tumbuh dan berkembang kurang mendapatkan perhatian serius dari kaum intelektual Islam. Kecilnya perhatian ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya: *Pertama*, pandangan umat Islam yang terlalu terpukau dengan gagasan-gagasan modern yang terangkum dalam ideologi pembangunan. Keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk maju dengan mengikuti resep ekonomi pertumbuhan mendorong banyak kaum intelektual Muslim untuk lebih memfokuskan pada bagaimana

modal kultural dari masyarakat industri harus tertanam. *Kedua*, tidak memiliki alat bantu yang memadai, sementara pertumbuhan pemikiran yang mencoba untuk melakukan pendekatan struktural banyak diabaikan. Gagasan pemikiran Islam lebih terjebak dan termotivasi untuk menanggapi isu-isu yang sementara, sehingga selalu mengalami ketertinggalan ketika perkembangan di masyarakat kian dinamis. Keasyikan pembaruan teologi keagamaan juga telah mengaburkan wacana praksis yang justru erat dengan kehidupan umat. *Ketiga*, lemahnya kesadaran kritis atau rendahnya pengawasan pada kekuasaan negara. Padahal modal sebagai entitas kekuasaan mempunyai kewenangan informal yang jauh lebih perkasa ketimbang Negara. Sebab, negara telah dikooptasi oleh kepentingan modal itu sendiri.

Untuk itulah diharapkan pola pemikiran keagamaan yang sedekat mungkin memiliki hubungan erat dengan praksis sosial ekonomi masyarakat sehari-hari. Makna wahyu, sebagaimana dinyatakan oleh pendekatan transformatif, harus menemukan tempatnya dalam proses sosial. Inilah hakikat Islam Kiri yang memilih perubahan revolusioner sebagai cara perubahan. Islam yang melihat bahwa pembasmian tatanan yang timpang adalah tugas prioritas dan sejajar dengan maksud turunnya agama. Islam kiri mengambil perhatian utama bahwa substansi ketidadaadilan bukan semata karena kondisi internal melainkan yang jauh lebih penting adalah faktor keterkaitan dengan konteks internasional.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, Islam Kiri masih cenderung berjarak dengan masyarakat. Untuk itulah agar menjadi gerakan yang luas dan mendapat dukungan, Islam Kiri perlu merintis beberapa praktik yang akan mendekatkannya pada tujuan utama; terciptanya tatanan keadilan. Di sinilah pentingnya merumuskan gerakan Islam Kiri dalam beberapa praktek yang relevan dan memungkinkan untuk diterapkan pada masa pemerintahan transisi yang masih berbau fasis.

Pertama. gerakan Islam perlu melakukan langkah advokasi untuk membela umat yang tertindas. Dalam manajemen dakwah, advokasi adalah jurus ampuh yang mampu menggantikan tuntutan abstrak menjadi konkret; mendorong ummat menggantikan kesadaran ideologi dengan ilmu sekaligus kesadaran subyektif umat menjadi kesadaran obyektif. Kesadaran ideologi membuat umat menjadi tertutup dan mudah

dirangsang kecurigaannya sehingga selalu memandang diri sebagai yang paling benar.

Kedua, gerakan Islam perlu melakukan penataan sistematis melalui jaringan kerja internasional yang lebih terlembaga. Bentuk kerja sama ini meliputi bidang-bidang strategis yang mampu menjawab keluhan-keluhan umat.

Ketiga, menggali potensi media sebagai institusi pembentuk opini. Dalam konteks ini kita menyaksikan betapa media memiliki kemampuan dan pengaruh sosial yang luar biasa, khususnya dalam menentang wewenang kelembagaan yang telah mapan. Gambaran yang dibuat media mampu membangun stereotip. Yaitu suatu pola tertentu sebagai hasil cetakan yang muncul mengenai gambaran realitas yang ada, semisal kelompok garis keras, teroris, dan fanatic—kebanyakan juga ulah media terhadap gerakan Islam.

Keempat, mengembangkan ketrampilan teknokratis gerakan Islam agar sejajar dengan lembaga pembuat kebijakan. Di sini gerakan advokasi yang dilakukan selain melayani kebutuhan untuk mengkritisi sebuah peraturan juga dapat memfasilitasi pembuatan *legal draft*.

Dari beberapa langkah di atas, gerakan advokasi diharapkan mampu memberi peran pembebasan kesadaran kalangan Muslim, dari kesadaran magis dan naif menjadi kesadaran kritis. Berdasarkan pada model gerakan advokasi ini, setidaknya ada dua pilihan yang dapat diraih umat Islam, yaitu: *pertama*, secara material membuktikan bahwa Islam memang rahmat bagi seluruh alam, karena dalam gerakan advokasi sasarannya bukan lagi siapa beragama apa melainkan mereka yang tertindas oleh ketidakadilan, maka wajib untuk dibela. *Kedua*, mewujudkan cita-cita kemanusiaan, yakni terbangunnya keadilan. Karena kekuatan hukum bergantung pada jangkauan keadilan. Dalam kaitan inilah maka menarik jika gerakan Islam terlibat aktif dalam proses pembelaan hukum sebagaimana yang terangkum dalam gerakan advokasi. Gerakan advokasi tidak semata memberi bantuan hukum, tetapi juga mencoba melakukan perombakan tertib sosial yang lebih mendasar.

Tabel III. Perbedaan antara Islam Kiri dan model Islam konservatif:

ISLAM KONSERVATIF	ISLAM KIRI
<p>Orientasi pada jaminan kehidupan yang mapan, stabil dengan menyesuaikan spirit keagamaan pada modernitas dan pembangunan.</p> <p>Mendorong agama untuk menjadi urusan privat dan tidak diperlukan untuk menjawab semua masalah sosial.</p> <p>Mengadaptasikan semua perangkat ajarannya agar sesuai dengan sistem ekonomi pasar bebas, sistem politik yang “demokratis” dan sistem sosial yang pluralistik.</p> <p>Melihat semua akar persoalan pada pemahaman literer dan absolut kalangan agamawan terhadap wahyu Tuhan.</p> <p>Menempatkan Islam sama dengan agama-agama lainnya, dalam arti sama-sama menyuruh saling bersikap kasih sayang, toleransi dn terbuka.</p> <p>Pemuka keagamaan adalah intelektual borjuis yang memiliki prasyarat pengetahuan agama yang mendalam (bila perlu lulusan sekolah tinggi agama).</p>	<p>Orientasi pada perubahan struktur sosial yang menindas dan menyingkap segala bentuk kejahatan pembangunan.</p> <p>Mendorong agama sebagai kekuatan pembebas terutama bagi pemeluk yang terancam secara sosial oleh sistem ekonomi dan politik yang destruktif.</p> <p>Mengadaptasikan semua perangkat ajarannya untuk membongkar semua sistem politik, sosial, dan kebudayaan yang mengalienasi kelompok miskin dan sistem yang telah mendorong adanya diskriminasi.</p> <p>Melihat akar persoalan ada pada sistem politik dan ekonomi dunia yang memang sejak semula tidak adil dan berpihak pada kepentingan kaum pemodal.</p> <p>Menempatkan Islam sebagai agama wahyu terakhir yang pertama-tama berorientasi pada pembasmian penindasan ekonomi dan dalam kondisi yang dipersyaratkan memperkenankan dipakainya kekuatan fisik demi tegaknya keadilan.</p> <p>Pemuka agamanya banyak berasal dari kalangan miskin dan tertindas.</p>

Islam Kiri menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar bagi dirinya untuk membangun gerakan yang progresif dan mencerahkan kehidupan umat. Beberapa ayat yang sangat

menunjukkan pemihakan Islam terhadap kaum tertindas di antaranya dapat dilihat pada

Tabel IV berikut:

PRINSIP	MAKNA	AYAT QUR'AN TERKAIT
☞ Melawan segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan.	Islam memusuhi kaum yang mengeksploitasi kelompok miskin.	QS 4:7; QS 8:39; QS 4:148; QS 7:137; QS 9:103; QS 22:39; QS 2:190; QS 9:36; QS 2:191; QS 59:7-8; QS 89:6-14.
☞ Menentang monopoli ekonomi dan kapitalisme.	Islam melarang penimbunan kekayaan dan tradisi konsumtif.	QS 104:6-8; QS 7:31; QS 59:7; QS 9:34; QS 2:129; QS 2:275-278; QS 30:39; QS 104:1-4; QS 7:31; QS 57:7; QS 51:19; QS 2:190; QS 6:142; QS 10:12,83; QS 21:9; QS 26:151; QS 51:34; QS 42:5; QS 44:31.
☞ Membela kaum lemah dan tertindas.	Islam menyuruh orang beriman untuk membela kelompok lemah serta larangan untuk menganiaya mereka.	QS 17:16; QS 28:5; QS 4:75; QS 62:2; QS 22:45; QS 107:1-3; QS 2:264; QS 42:8.
☞ Menegakkan keadilan dan prinsip pemerataan.	Islam mengutuk sistem hukum, sosial, ekonomi, politik yang tidak adil & menempatkan parameter ketakwaan pada sejauh mana menegakkan keadilan.	Qs 7:29; QS 4:135; QS 5:8; QS 9:34; QS 55:8-9; QS 11:84-85; QS 2:188; QS 2:275; QS 2:278-279.

Nilai penting buku ini adalah upaya untuk merombak tatanan doktrin Islam menjadi lebih hidup dan membumi, bahwa dalam wahyu Al-Qur'an terdapat banyak ajaran yang sangat esensial namun masih sering dilupakan oleh umat Islam sendiri. Bahwa bangunan Islam perlu ditegakkan di atas segala permasalahan sosial kemasyarakatan. Gagasan dalam buku ini hendak meletakkan kembali posisi Islam sebagai gerakan alternatif. Buku ini mengajak untuk melakukan penyelaman sudut pandang Islam dari sisi

yang masih tak berdaya agar mampu tampil lebih kritis, memberdayakan dan mampu menjawab tantangan zaman, sebagaimana Islam yang dibawakan para nabi terdahulu yang selalu menempatkan diri sebagai gerakan perlawanan atas berbagai ketimpangan, kezaliman, dan kebobrokan sistem yang mencuat dalam masyarakatnya.

Akhirnya, buku ini mencoba untuk mengkonstruksi Islam sebagai alternatif atas gurita kapitalisme global berikut implikasinya terhadap dehumanisasi umat manusia, pelanggaran HAM, pelecehan budaya, serta kekerasan dalam beragam wajah. Gagasan dalam buku ini diharapkan dapat menciptakan ruang untuk refleksi bagi golongan Islam mana pun yang hendak meletakkan kembali posisi Islam sebagai gerakan alternatif.

